

**KEBIJAKAN PENYALURAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL  
GEMILANG DARI PEMERINTAH PROVINSI NTB TERHADAP MASYARAKAT di  
TENGAH MASA PANDEMI COVID-19**

**(STUDI PADA PENYALURAN BANTUAN di DESA SAPUGARA-BREE, KSB)**

**PROPOSAL SKRIPSI**



**Diajukan Oleh :  
REZZA OKTAVIANI  
NPM : 17.01.03.0.053-01**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SAMAWA SUMBAWA BESAR  
TAHUN 2021**

**JUDUL PROPOSAL PENELITIAN :**

**KEBIJAKAN PENYALURAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL  
GEMILANG DARI PEMERINTAH PROVINSI NTB TERHADAP  
MASYARAKAT di TENGAH MASA PANDEMI COVID-19  
(STUDI PADA PENYALURAN BANTUAN di DESA SAPUGARA-BREE,  
KSB)**

**NAMA MAHASISWA :**

**REZZA OKTAVIANI  
NPM : 17.01.03.0.053-01**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Proposal ini telah disetujui

Untuk di uji

Tanggal :

Oleh

Pembimbing I

Pembimbing II

**Prof. Dr. Syaifuddin Iskandar, M.Pd**

**Muslim, S.Sos.,M.Sos**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena limpahan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar SAW, beserta keluarga, para sahabat dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafa'atnya di akhir nanti, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Dalam penyelesaian proposal skripsi yang berjudul “**KEBIJAKAN PENYALURAN BANTUAN JARING PENGAMAN SOSIAL GEMILANG DARI PEMERINTAH PROVINSI NTB TERHADAP MASYARAKAT di TENGAH MASA PANDEMI COVID-19. STUDI PADA PENYALURAN BANTUAN di DESA SAPUGARA-BREE**” penulis banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak, sehingga melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syaifuddin Iskandar, M.Pd selaku Ketua Yayasan Universitas Samawa (UNSA) Sumbawa Besar dan sekaligus dosen pembimbing I
2. Bapak Dr. Syafruddin, SE., MM selaku Rektor Universitas Samawa (UNSA) Sumbawa Besar
3. Ibu Sri Nurhidayati, S.IP., MPA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samawa (UNSA) Sumbawa Besar

4. Bapak Heri Kurniawansyah HS, S.AP., MPA. selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIPOL Universitas Samawa (UNSA) Sumbawa Besar
5. Bapak Muslim, S.Sos., M.Sos. selaku pembimbing II
6. Kedua Orang Tua, Saudara, Keluarga, Teman dan Sahabat yang telah memberikan dukungan, do'a, dan senantiasa memotivasi saya
7. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samawa, terkhusus dua sahabat saya yang sudah mendukung dan membersamai saya, serta seluruh angkatan 2017 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang pula telah memberi semangat do'a serta dukungannya.

Sehubung *Tak ada gading yang tak retak* peneliti pun menyadari bahwa proposal ini masih banyak kekurangan, karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sangat peneliti harapkan demi penyempurnaan pada masa yang akan datang. Akhirnya, semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Semoga proposal ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya, Aamiin.

Sumbawa Besar, 31 Maret 2021

## Daftar Isi

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan data dari Gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 tanggal 29 Juni 2020 yang lalu terdapat 55.092 kasus positif Covid-19 dan kasus yang meninggal dunia akibat terinfeksi virus ini berjumlah 2.801 jiwa. Tak kurang seluruh provinsi di Indonesia yang berjumlah 34 provinsi sudah terinfeksi virus tersebut. Pemerintah seakan tak berdaya menekan kasus Covid-19 ini yang semakin hari semakin meningkat jumlah kasus yang terkonfirmasi positif hingga bertambah juga korban meninggal akibat terinfeksi virus tersebut. Masyarakat sangat khawatir akibat perkembangan kasus ini yang tidak tau sampai kapan virus ini bisa hilang atau berkurang perkembangannya di Indonesia. Menilik jauh kebelakang sebelum kasus Covid-19 ini sudah menyebar di seluruh provinsi di Indonesia, pemerintah tidak tinggal diam dalam mewabahnya pandemic virus Covid-19 ini. Ketika awal masuknya virus ini di Indonesia pemerintah sudah mengantisipasi perkembangan virus Covid-19 agar korban yang terinfeksi virus ini tidak terlalu besar hingga dapat meminimalisir jumlah korban yang meninggal akibat virus ini. Langkah-langkah pemerintah dalam mengatasi pandemic Covid-19 dilakukan dengan mengeluarkan beberapa kebijakan baik itu kebijakan memperkecil

ruang lingkup penyebaran virus itu dengan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB), kebijakan dalam bidang ekonomi, hingga kebijakan dalam hal kesehatan. Tetapi kenyataannya bahwa virus ini semakin hari semakin tak terkendali jumlah kasus yang positif sudah tembus 55 ribu orang yang terkonfirmasi positif. Terjadi PHK besar-besaran tak kurang 6 Juta orang terkena PHK hingga COVID19 & DISRUPSI Tatanan Sosial, Budaya , Ekonomi, Politik, dan Multi 293 di rumahkan akibat dampak Covid-19 ini (Indraini Annisa, 2020).

Dunia hari ini memang sudah mengklaim menemukan vaksin untuk pencegahan covid-19, namun hal ini tidak menghentikan langkah pemerintah untuk terus mengingatkan masyarakatnya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, bahkan sampai saat ini di beberapa daerah masih menggunakan sistem belajar dan bekerja dari rumah, hal yang seperti ini tentu sangat berdampak untuk masyarakat. Mengingat kembali PSBB yang pertama kali dilakukan di DKI Jakarta dimana hal ini tentu tidak dapat dilakukan begitu saja, keputusan untuk melakukan PSBB memerlukan beberapa pertimbangan serta dilihat juga dari beberapa aspek seperti melihat peningkatan pasien terdampak covid hingga kesanggupan suatu daerah dalam penerapannya. PSBB yang dilakukan di DKI Jakarta mengacu pada Permenkes Nomer 9 tahun 2020 dimana pelaksanaan PSBB akan berlangsung selama 14 hari dan dapat diperpanjang sesuai dengan kondisi wabah dan dimulai per tanggal 10 april 2020. Tidak hanya itu ada pula beberapa aturan terkait PSBB seperti yang tercantum dalam Peraturan

Pemerintah (PP) Nomer 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 di Pasal 4 Ayat 1 membahas tentang peliburan sekolah, tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, serta pembatasan kegiatan di tempat dan fasilitas umum. Selanjutnya setelah DKI Jakarta ada beberapa daerah lainnya yang pula menerapkan sistem PSBB guna menekan penyebaran covid-19 seperti kota Tangerang, kota Bogor, kabupate Bekasi dan lainnya.

Provinsi Nusa Tenggara Barat yang pula saat itu mengalami pelonjakan angka positif Covid-19 bahkan meningkat cukup pesat dibandingkan Bali dan Nusa Tenggara Timur dituntut untuk terus menekan penyebaran dan harus mampu mengurangi angka terkait, namun dikarenakan beberapa faktor yang masih kurang memadai dari provinsi NTB sehingga penerapan sistem PSBB di NTB tidak diberlakukan, hal ini juga dilakukan dengan penuh pertimbangan sebelumnya. Seperti yang diuraikan oleh Ketua Gugus Tugas Penangan Covid-19 NTB, Lalu Gita Aryadi (2020/4/5) “Kita sudah koordinasi, dalam mengantisipasi Covid-19, tidak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tapi Pembatasan Sosial Berskala Lingkungan (PSBL)”. Beliau juga memaparkan alasan kenapa keputusan ini yang dijalankan, hal ini karena pemerintah juga harus melihat dampak dari penerapan PSBB dalam berbagai sisi seperti sosial, ekonomi dan anggaran dalam penanganan kasus Covid-19 tersebut. Sedangkan PSBL dilakukan dalam rangka mendisiplinkan masyarakat ununtuk mencegah penularan Covid-19 di lingkungan masing-masing.



Pandemi Covid-19 ini tentunya tidak dapat diremehkan, terlebih pandemi saat ini menyebabkan efek domino yang sangat signifikan kepada empat aspek kehidupan, seperti yang diungkapkan dalam diskusi virtual yang digagas oleh Institut Pertanian Bogor (IPB) dimana menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati (27/06/2020) “Namun kita melihat pandemi Covid-19 menimbulkan (efek) domino yang luar biasa. Masalah kesehatan menjadi masalah sosial, masalah ekonomi, masalah keuangan, dan masalah politik,”

Untuk menanggulangi wabah pandemi ini pemerintah Indonesia tentunya telah mengupayakan beragam solusi, dan di NTB sendiri menerapkan sebuah kebijakan yakni kebijakan JPS Gemilang yang sejak awal diharapkan mampu menjadi roda penggerak ekonomi rakyat di situasi genting seperti saat ini. Selain itu pemprov NTB juga mengerahkan beberapa kebijakan lain di sektor ekonomi melalui dua skema perlindungan ekonomi, yakni program padat kerja dimana dalam hal ini pemerintah memberikan pekerjaan membuat produk dan dibeli, lalu selanjutnya adalah bantuan sosial langsung berupa sembako yang dihasilkan oleh warga sebelumnya, dalam hal ini pemerintah menekankan kepada warga masyarakatnya untuk lebih mencintai dan menggunakan produk lokal. Selanjutnya hal inilah yang akan peneliti bahas dalam proposal skripsi ini, dimana tentang bagaimana pemerintah menjalankan kebijakan tersebut dan persepsi masyarakat terkait kebijakan tersebut terkhusus masyarakat desa Sapugara-Bree, Kabupaten Sumbawa Barat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Implementasi Program JPS Gemilang di masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumbawa Barat?
2. Bagaimanakah hambatan yang terjadi selama program JPS Gemilang di Kabupaten Sumbawa Barat?
3. Bagaimana solusi yang tepat guna memperbaiki kebijakan dari JPS Gemilang tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui implementasi dari program JPS Gemilang yang diadakan oleh Pemprov NTB terkhusus di desa Sapugara-Bree, KSB
2. Guna melihat hambatan apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan program di tahap pertama
3. Untuk menganalisis perbaikan kebijakan program JPS Gemilang di desa Sapugara-Bree, KSB

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai salah satu prasyarat untuk memperoleh gelar strata/I (SI) di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Samawa, Sumbawa Besar.
  - b. Penelitian dilakukan guna mengimplementasikan fungsi mahasiswa sebagai *agent of change* dan *agent of control*, dengan upaya awal

mendengarkan kembali persepsi masyarakat terkait sebuah kebijakan guna nantinya dapat menjadi acuan saat disuarakan kepada pemerintah yang bersangkutan maupun kepada tingkat yang lebih lanjut.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian dapat menjadi gambaran nyata dan menjadi bahan tambahan serta pertimbangan bagi pemerintahan Provinsi bahkan Desa, terkhusus desa Sapugara-Bree.

### b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya agar lebih peka terhadap kebijakan-kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah baik di ranah terkecil hingga pusat, dan melalui itu diharapkan masyarakat dapat meningkatkan kreatifitas melalui kearifan lokal yang ada.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Kebijakan**

##### **1. Definisi Kebijakan**

Kebijakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan atau sasaran. Secara etimologis, menurut Dunn menjelaskan bahwa istilah kebijakan (*policy*) berasal dari bahasa Yunani, Sanksekerta dan Latin. Dalam bahasa Yunani dan kebijakan disebut dengan *polis* yang berarti “negara-kota” dan sansakerta disebut dengan *pur* yang berarti “kota” serta dalam bahasa Latin disebut dengan *politia* yang berarti negara. (Dunn, 2007: 51).

Beberapa ilmuwan menjelaskan berbagai macam mengenai kebijakan diantaranya, Carl Friedrich dalam Indiahono menyatakan bahwa “kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatanhambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang di usulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.” (Indiahono, 2009: 18). Dalam kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objective*)

atau kehendak (*purpose*). Sementara itu Jones mendefinisikan kebijakan yaitu: “Perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada didalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis. Ini akan dibicarakan secara khusus dalam bagian lain, dalam hubungan dengan sifat dari kebijakan” (Abidin, 2008: 25)

Menurut Abidin kebijakan secara umum dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkatan :

- a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undangundang.
- c. Kebijakan teknis, yaitu kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan. (Abidin, 2008: 25).

## **B. Konsep Implementasi Kebijakan**

### **1. Pengertian Implementasi**

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster (Wahab, 2008:64) adalah: Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn (Winarno, 2002:102) bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Pandangan Meter dan Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok

badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Mazmanian dan Sabatier (Wahab, 2008:68) juga mendefinisikan implementasi yang merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk Undang-Undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.

Implementasi menurut Mazmanian dan Sabatier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk Undang-Undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan Undang-Undang, kemudian output kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

## 2. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart

(Winarno, 2012:101- 102) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersamasama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Jadi implementasi itu merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi Pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat. Implementasi kebijakan menurut Nugroho(2003:158) terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan tersebut. Oleh karena itu, implementasi kebijakan yang telah dijelaskan oleh Nugroho merupakan dua pilihan dimana yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

Pengertian implementasi kebijakan di atas, maka George C. Edward III (Nawawi, 2009:138) mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

- a. Comunication (Komunikasi),
- b. Resources (Sumber Daya),



- c. Disposition (Disposisi),
- d. Bureaucratic Structure (Struktur Birokrasi).

Pertama, Komunikasi implementasi mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Selain itu juga dalam komunikasi implementasi kebijakan terdapat tujuan dan sasaran kebijakan yang harus disampaikan kepada kelompok sasaran, hal tersebut dilakukan agar mengurangi kesalahan dalam pelaksanaan kebijakan. Komunikasi kebijakan memiliki beberapa macam dimensi, antara lain dimensi transformasi (*transmission*), kejelasan (*clarity*), dan konsistensi (*consistency*).

Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran dan pihak lain yang terkait dengan kebijakan. Dimensi kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para pelaksana, target group dan pihak lain yang berkepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan dapat diterima jelas sehingga dapat diketahui yang menjadi maksud, tujuan dan sasaran.

Kedua, sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terlaksananya keberhasilan terhadap suatu implementasi, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, akan tetapi apabila implementator kekurangan sumber daya untuk melaksanakan kebijakan maka tidak akan berjalan

dengan efektif. Sumber daya yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan dapat berwujud, seperti sumber daya manusia, dan sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, sumber daya informasi dan kewenangan.

Sumber daya manusia merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi. Implementasi sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur), dengan demikian sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan di samping harus cukup juga harus memiliki keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anjuran dan perintah dari atasan (pimpinan). Oleh karena itu, sumber daya manusia harus ada ketepatan dan kelayakan antara jumlah staf yang dibutuhkan dan keahlian yang dimiliki sesuai dengan tugas pekerjaan yang di tangannya.

Sumber daya anggaran merupakan sumber daya yang mempengaruhi implementasi setelah adanya sumber daya manusia, terbatasnya anggaran yang tersedia menyebabkan kualitas pelayanan terhadap publik yang harus diberikan kepada masyarakat juga terbatas. Terbatasnya anggaran menyebabkan disposisi para pelaku rendah bahkan akan terjadi goal displacement yang dilakukan oleh pelaku terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sumber daya peralatan merupakan sumber daya yang mempengaruhi terhadap keberhasilan dan kegagalan suatu

implementasi, menurut Edward III yaitu: “Sumber daya peralatan merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan”.

Terbatasnya fasilitas peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan, karena dengan terbatasnya fasilitas sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat, andal, dan dapat di percaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Sumber daya informasi dan kewenangan juga menjadi faktor penting dalam implementasi, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan.

Informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara menimplementasikan. Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III menegaskan bahwa kewenangan (authority) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan.

Ketiga, disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Widodo, 2007:105) terdapat tiga macam elemen yang mempengaruhi disposisi yaitu pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and understanding) terhadap kebijakan, arah respon mereka apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and rejection), intensitas terhadap kebijakan”. Elemen yang dapat mempengaruhi disposisi adalah pengetahuan, di mana pengetahuan merupakan elemen yang cukup penting karena dengan pengetahuan tinggi yang dimiliki oleh aparatur dapat membantu pelaksanaan implementasi tersebut. Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Respon masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak. Keempat, struktur birokrasi merupakan suatu badan yang paling sering terlibat dalam implementasi kebijakan secara keseluruhan.

Struktur Organisasi yang bertugas melaksanakan kebijakan memiliki pengaruh besar terhadap pelaksanaan kebijakan. Dalam struktur birokrasi terdapat dua hal penting yang mempengaruhinya salah satunya yaitu aspek struktur birokrasi yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP). SOP ini merupakan pedoman bagi pelaksana kebijakan dalam bertindak atau menjalankan tugasnya. Selain SOP yang mempengaruhi struktur birokrasi adalah fragmentasi dari luar organisasi.

### **C. Konsep Masyarakat**

#### **1. Definisi Masyarakat**

Masyarakat adalah sejumlah besar orang yang tinggal dalam wilayah yang sama, *relatif independent* dan orang-orang diluar wilayah itu, dan memiliki budaya yang relatif sama.

Berikut pemaparan beberapa ahli terkait definisi masyarakat:

- a. Menurut Selo Sumardjan masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama dan menghasilkan kebudayaan,
- b. Karl Marx mengemukakan jika masyarakat adalah suatu struktur yang menderita suatu ketegangan organisasi atau perkembangan akibat adanya pertentangan antara kelompok-kelompok yang terbagi secara ekonomi.

- c. Menurut Emile Durkheim masyarakat ialah suatu kenyataan objektif pribadi-pribadi yang merupakan anggotanya.
- d. Paul B. Horton & C. Hunt masyarakat ialah kumpulan manusia yang relative mandiri, hidup bersamaa-sama dalam waktu yang cukup lama, tinggal di suatu wilayah tertentu, mempunyai kebudayaan sama serta melakukan sebagian besar kegiatan di dalam kelompok / kumpulan masyarakat tersebut.

## 2. Faktor-faktor atau Unsur Masyarakat

Menurut Soejono Soekanto masyarakat setidaknya memuat unsur sebagai berikut:

- a. Beranggotakan minimal dua orang,
- b. Anggotanya sadar sebagai suatu satu kesatuan,
- c. Berhubungan dalam waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang saling berkomunikasi dan membuat aturan-aturan hubungan antar anggota masyarakat,
- d. Menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan satu sama lain sebagai anggota masyarakat.

### 3. Ciri / Kriteria Masyarakat Yang Baik

Menurut Marion Levy diperlukan empat kriteria yang harus dipenuhi agar sekumpulan manusia bisa dikatakan sebagai masyarakat yakni:

- a. Ada sistem tindakan utama
- b. Saling setia pada system tindakan utama
- c. Mampu bertahan lebih dari satu masa hidup seorang anggota
- d. Sebagian atau seluruh anggota naru didapat dari kelahiran / reproduksi manusia.

### D. Covid-19

#### 1. Sekilas COVID-19

Covid-19, singkatan dari *Coronavirus Disease* 2019 yang dapat diartikan sebagai penyakit yang menyerang saluran pernapasan manusia pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada akhir 2019 lalu. Penyebaran virus yang belum ditemukan penawarnya itu hingga kini tak terkendali. Sudah 200 lebih negara di dunia melaporkan adanya kasus terpapar virus corona. Di Indonesia kasus ini pertama kali ditemukan pada dua warga Depok, Jawa Barat awal Maret lalu. Berdasarkan data dari laman Worldmeters per 26 Juni 2020, total kasus Covid-19 di dunia mencapai 10,250,322 kasus yang mana sebanyak 5,558,161 telah sembuh dan 504,498 orang meninggal dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri kasus yang sudah terkonfirmasi sebanyak 54,010 kasus dengan angka kematian mencapai 2,754 kasus dan angka sembuh sebanyak 22,936.

Cepatnya penyebaran virus ini di Indonesia menurut Juru Bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Achmad Yurianto karena banyak warga yang tak mengikuti imbauan untuk tetap di rumah

## 2. Penyebaran dan Penanganan Mandiri

### a. Penyebaran

Virus corona menular lewat lendir (*droplet*) manusia positif COVID-19 yang meloncat ke manusia negatif COVID-19, lendir itu terciprat saat manusia positif COVID-19 bersin, batuk, atau berbicara lalu terkena orang lain yang negatif. Selain itu penyebaran juga dapat terjadi melalui interaksi antar manusia baik itu secara langsung dalam hal ini bersentuhan maupun tidak langsung yakni melalui benda-benda.

### b. Pencegahan Mandiri

Setiap warga berperan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona atau COVID-19. Caranya seperti mengikuti instruksi pemerintah, yakni: melakukan *social distancing* dan tidak keluar rumah jika dirasa tidak terlalu penting, begitu pula bagi para pekerja yang diimbau untuk kerja dari rumah atau *work from home*, serta para pelajar yang dianjurkan untuk *study at home*.

Sayangnya di beberapa kesempatan masih saja banyak masyarakat yang mengabaikan imbauan ini pula masih banyak warga yang berkerumun di luar rumah. Inilah yang menyebabkan



lonjakan kasus virus covid-19 di Indonesia, selain itu karena penularan Covid-19 yang diakibatkan oleh interaksi antar manusia baik itu secara langsung maupun tidak tersebut pemerintah dan dinas kesahatan dan penanggulangan Covid-19 menganjurkan masyarakat untuk lebih menjaga kebersihan, sering-sering mencuci tangan dan berganti pakaian setibanya di rumah.

### 3. Statistik penyebaran

Berita terupdate dari laman Worldmeters per 02 April 2020 jam 11:05 ada sejumlah 130.313.463 jiwa yang terdampak Covid-19 dengan 2.842.621 jiwa yang meninggal dunia dan sebanyak 104.996.315 jiwa yang sembuh. Di Indonesia sampai saat ini berada di urutan ke 20 dari 218 negara terdampak yakni dengan 1.517.854 jiwa yang positif 41,054 yang meninggal dunia serta 1,355,578 jiwa yang berhasil selamat. Dan berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Nusa Tenggara Barat per tanggal 01 April 2021 saat ini ada sebanyak 995 jiwa yang tengah dirawat, 9530 jiwa yang telah sembuh dan yang meninggal dunia sebanyak 476 jiwa sehingga total keseluruhannya ada 11.001 jiwa yang sebelumnya terindiasi. Serta terakhir di Kabupaten Sumbawa Barat dari 487 orang ada 3 orang yang masih diisolasi, 480 orang yang telah sembuh serta 7 orang meninggal dunia.

#### 4. Penanganan dan Vaksinasi

Untuk penanganan di Provinsi NTB cara paling sederhananya adalah dengan mengunjungi laman GERMAS (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat) NTB, karena pada laman tersebut telah disediakan beberapa informasi penting seperti peta persebaran Covid-19 secara Dunia Nasional hingga Kabupaten yang selalu diupdate. Selain itu di laman tersebut juga disediakan informasi seperti gejala dan penanganan mandiri, info germas, rumah sakit rujukan pula satuan tugas terkait dan *self check up*.

Vaksin adalah bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan terhadap suatu penyakit. Pemberian vaksin dilakukan untuk mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu. Vaksin diberikan kepada seseorang untuk meningkatkan kekebalan di dalam tubuh, mencegah dan mengurangi pengaruh infeksi penyebab penyakit-penyakit tertentu. Di saat *Coronavirus disease 2019* (COVID-19) mewabah di Indonesia di tahun 2020 lalu, pemerintah Indonesia mengantisipasi penyebaran wabah Covid-19 dengan melakukan vaksinasi massal secara bertahap di tahun 2021 menggunakan beberapa jenis vaksin. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menetapkan tujuh jenis vaksin COVID-19 yang akan digunakan untuk pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Antara lainnya adalah, Vaksin AstraZeneca, Bio Farma, China National Pharmaceutical

Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc. BioNTech dan SinovacLife Sciences Co., Ltd.,.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan, perkembangan program vaksinasi nasional saat ini telah mencapai angka 10 juta vaksin. Berkat hal itu, Indonesia berhasil menjadi salah satu dari empat negara di terbanyak dalam memberikan vaksin di luar negara produksi vaksin. Brazil, Turki, dan Jerman merupakan tiga besar negara yang berhasil memenuhi target vaksin di masing-masing negara. Sebagaimana yang dipaparkan saat pelaporan perkembangan terkait vaksinasi Nasional kepada Bapak Presiden oleh Budi Gunadi yakni (29/03/2021) “Alhamdulillah, hari ini vaksinasi bisa tembus 10 juta. Indonesia punya kecepatan harian vaksinasi mencapai 500.000 suntikan per hari. Kita harapkan pada Maret dan April, ketika ketersediaan vaksin mencapai 15 juta, kita sudah sesuai kecepatan penyuntikannya,” .

## **E. Program JPS Gemilang**

### **1. Jaring Pengaman Sosial (JPS)**

Jaring Pengaman Sosial (JPS) adalah salah satu program dari pemerintah pusat yang diberikan untuk membantu keluarga miskin dan rentan di daerah episentrum COVID-19 agar meringankan beban mereka selama pandemi. Jaring pengamanan sosial diperlukan sehingga masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu tetap terjamin hidupnya di tengah pandemi COVID-19 yang hingga saat ini masih

belum bisa diprediksi kapan akan berakhir. Berikut beberapa program Jaring Pengaman Sosial oleh Pemerintah Pusat dalam upaya penekanan COVID-19:

- a. PKH (Program Keluarga Harapan) kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) yang bantuannya dinaikkan 25% dalam setahun,
- b. Kartu sembako dinaikkan dari 15,2 juta menjadi 20 juta penerima, dengan manfaat sebesar Rp200.000,- (duaratusribu rupiah) selama 9 bulan atau naik 33%,
- c. Kartu prakerja dinaikkan dari Rp10.000.000.000.000,- (sepuluh triliun rupiah) menjadi Rp20.000.000.000.000,- (dua puluh triliun rupiah) untuk mengcover sekitar 5,6 juta pekerja informal pelaku usaha mikro dan kecil,
- d. Pembebasan biaya listrik 3 bulan untuk 24 juta pelanggan listrik 450 VA dan diskon 50% untuk 7 juta pelanggan 900 VA bersubsidi,
- e. Untuk mengantisipasi kebutuhan pokok, pemerintah mencadangkan dana Rp25.000.000.000.000,- (duapuluh lima triliun rupiah) untuk operasi pasar dan logistic,
- f. Keringanan pembayarankredit bagi para pekerja informal, baik ojek online, sopir taksi, UMKM, nelayan, dengan penghasilan harian dan kredit di bawah Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah),
- g. Bantuan social tunai sebesar masing-masing Rp600.000,- bagi 9.000.000 keluarga miskin.

## 2. Jaring Pengaman Sosial Gemilang

Jaring Pengaman Sosial Pemerintah Daerah Pemerintah Provinsi NTB meluncurkan program Jaring Pengaman Sosial untuk melengkapi JPS Pemerintah Pusat yang disebut JPS Gemilang ditujukan kepada masyarakat miskin/rentan miskin yang ada di dalam DTKS dan masyarakat terdampak, tidak mampu atau masyarakat yang kehilangan pekerjaan atau penghasilan seperti tenaga kesehatan di rumah sakit, pekerja yang dirumahkan(PHK), guru dan non guru honorer SMA/SMK, keluarga pasien dalam pengawasan (PDP), cleaning servis, penjaga malam, pedagang kaki lima, pekerja transportasi, pekerja sektor pariwisata, dan lain-lain.

a. Ketentuan dalam Jaring Pengaman Sosial Pemerintah Provinsi NTB, sebagai berikut:

- 1) JPS selain diberikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sesaat sekaligus memberdayakan IKM dan UMKM,
- 2) Mengutamakan penggunaan produk lokal dan membeli barang yang diproduksi oleh IKM dan UMKM lokal untuk dibagikan kemasyarakat melalui JPS Gemilang,
- 3) Sebanyak mungkin melibatkan IKM dan UMKM sehingga dapat menjaga siklus ekonomi lokal dan memberikan alternatif lapangan pekerjaan untuk warga masyarakat terdampak,

sehingga mereka masih tetap memiliki pendapatan dalam masa pandemi ini.

b. Adapun bantuan Jaring Pengaman Sosial sebagai berikut:

1) Paket bantuan sembako

Penurunan ekonomi akibat Covid-19 berdampak pada daya beli masyarakat dalam membeli kebutuhan pokok. Sementara itu, masyarakat juga membutuhkan gizi seimbang untuk meningkatkan kekebalan imun tubuh guna menghadapi bencana epidemic Covid-19. Untuk menjamin kesehatan Masyarakat, JPS memuat bahan pokok berupa beras, telur, daging ayam, ikan, produk olahannya atau sumber protein lainnya, minyak goreng sawit atau minyak kelapa, garam beryodium, gula putih.

2) Paket bantuan suplemen dan produk-produk IKM/UMKM lainnya. Suplemen diberikan dengan tujuan untuk dapat meningkatkan imunitas tubuh, paket suplemen terdiri dari: sabun (cair/batangan/antiseptic), susu sapi atau kedelai, minyak kayu putih/ minyak cengkeh/ essence oil lainnya, teh kelor/kopi/gula semut/serbat jahe/wedang jahe.

3) Paket bantuan masker non medis produk-produk IKM/UMKM,

4) Paket bantuan lainnya seperti, paket subsidi bahan bakar minyak dan bahan bakar gas untuk nelayan, paket ikan/makanan bagi keluarga tidak mampu, paket bantuan lainnya.

c. Pendataan, Perencanaan, Distribusi dan Pelaporan

Dalam pendataan, perencanaan, distribusi dan pelaporan diatur sebagai berikut:

1) Pendataan

Data yang digunakan bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial serta data masyarakat terdampak lainnya berasal dari OPD sesuai dengan tupoksi masing-masing. Tahapan verifikasi dan validasi data sebagai berikut:

- a) Data DTKS dari Provinsi di kirim ke Desa melalui Kab/Kota dan Kecamatan
- b) Verifikasi & Validasi KPM oleh Desa, boleh ditambah/dikurang sesuai kriteria
- c) Penetapan KPM dengan Keputusan Kades/Lurah

2) Perencanaan

Perencanaan kebutuhan JPS dikoordinasikan oleh Gugus Tugas Pemulihan Sosial Ekonomi bersama Dinas/Badan/Lembaga Terkait. Dalam melakukan proses perencanaan dengan mempertimbangkan:

- a) Pendanaan dan pengelolaan bantuan ditujukan untuk mendukung upaya penanggulangan bencana secara berdayaguna, berhasilguna, dan dapat dipertanggung jawabkan,

- b) Memenuhi kriteria yang diatur dalam aturan pemanfaatan Belanja Tidak Terduga,
- c) Efisiensi dan efektifitas pelaksanaan di lapangan.

### 3) Distribusi

Paket sembako, suplemen dan masker untuk masyarakat miskin DTKS adalah berbasis desa dan kelurahan, dibawah koordinasi Dinas Sosial Provinsi NTB. Untuk memastikan distribusi berjalan dengan lancar, diatur sebagai berikut:

- a) Barang-barang paket bantuan dari masing-masing OPD dikumpulkan secara bertahap sesuai jadwal di Gudang Kabupaten/Kota atau tempat yang ditentukan,
- b) Barang-barang di packing di Gudang oleh Penyedia/OPD dibawah koordinasi Dinas Sosial Provinsi NTB,
- c) Setelah barang lengkap dan cukup dalam satu kemasan kemudian di drop ke Desa/Kelurahan,
- d) Desa/Kelurahan mendistribusikan paket berdasarkan Data Final KPM,
- e) Distribusi oleh Pendamping desa, pilar sosial, tagana, satgas covid desa/kelurahan.

### 4) Pelaporan

Sistem pelaporan distribusi JPS dilakukan Secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten/kota yang dikoordinir oleh Dinas Sosial baik Kabupaten



dan Provinsi, selainitu juga membuat sistem informasi pelaporan dengan menggunakan teknologi informasi, dan membentuk command center pusat data dan informasi.

### 3. Pelaksanaan Program JPS Gemilang

Dalam proses pelaksanaa program Jaring Pengaman Sosial ini peneliti akan lebih fokus kepada penyaluran dan evaluasi dari penyaluran di tahap pertama dan kedua saja, serta agar penelitian yang akan diberlangsungkan nanti dapat lebih efisien dalam pelaksana tentu lebih banyak membahas tentang proses yang berlangsung di desa sapugara bree kabupaten sumbawa barat.

#### a. Penyaluran tahap pertama

Penyaluran tahap pertama akan mulai dilaksanakan dari tanggal 16 April 2020 dengan menysar 73.000 KK desil 1-3 yang tidak mmendapatkan program bantuan dari Kementrian Sosial RI, kemudian diberikan juga bantuan JPS Gemilang pada 32.000 KK dari kelompok masyarakat sektor formal dan informal serta dunia usaha yang terdampak Covid-19.

Yang dengan demikian, total penerima mencapai 105.000 KK. Dengan rincian, Kota Mataram 2.695 KK, Lombok Barat 8.052 KK, Lombok Tengah 15.997 KK, Lombok Timur 37.578 KK, Lombok Utara 4.079 KK, Sumbawa 5.681 KK, Sumbawa Barat 2.535 KK, Dompu 7.840 KK, Bima 12.604 KK, Kota Bima 1.939 KK, dan Provinsi 6.000 KK.

b. Penyaluran tahap kedua

Assisten II Setda Provinsi NTB, H. Ridwan Syah memaparkan tentang penyaluran JPS tahap II yang sudah berjalan lancar. Pembagian wilayah kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengawal dan bertanggung jawab terhadap penyaluran JPS di Kabupaten/Kota se-NTB telah berjalan lancar dan efektif, sehingga semua persoalan dan kendala dapat dihindari. “Rencananya melihat kebutuhan masyarakat, ada beberapa produk yang nantinya diganti, namun akan dilihat situasi dan keadaan produk tersebut, baik itu ketersediaan dan kebutuhan masyarakat, sehingga lebih bervariasi,” tutupnya.

Dalam pemberian JPS Gemilang Tahap 2 Pemprov NTB berusaha mengatasi berbagai permasalahan yang muncul pada pemberian paket sembako dan masker plus suplemen JPS Gemilang sebelumnya. Seperti pada masalah data, produk, hingga pada proses pendistribusiannya. Pendataan pada tahap dua ini akan disisir berjenjang, dengan pemberian kuota yang lebih proporsional di setiap desa. Bang Zul ingin memastikan agar data penerima JPS Gemilang dapat dikonfirmasi dan divalidasi oleh kepala desa, hal ini kepala desa boleh menambah atau mengurangi data penerima sesuai dengan fakta yang ada di lapangan.

JPS Gemilang tahap kedua ini masih dalam bentuk paket sembako dan masker plus suplemen. Bedanya pada tahap ini telur

ditiadakan dan akan diganti dengan produk ikan kering. Dengan rincian paket untuk Pulau Lombok berupa 10 kg Beras, 1 liter minyak kelapa, 1 ons bon ikan dan produk ikan kering.

Sementara paket sembako untuk Pulau Sumbawa berupa, 10 kg Beras, 1 liter minyak goreng sawit, 1 ons abon ikan, produk ikan kering dan garam. Paket masker dan suplemen berupa, dua buah masker non medis, susu kedelai, teh kelor/kopi, sabun cair/batang, dan minyak kayu putih. Semua produk JPS Gemilang dipastikan merupakan produk dari UKM lokal di NTB, kecuali minyak goreng sawit untuk Pulau Sumbawa.

JPS Gemilang tahap kedua diberikan kepada 125.000 KK di NTB, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 99.000 KK dan Non DTKS 26.000 KK.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada memerincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait. Harapannya ialah diperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena untuk selanjutnya dihasilkan sebuah teori. Karena tujuannya berbeda dengan penelitian kuantitatif, maka prosedur perolehan data dan jenis penelitian kualitatif juga berbeda. Salah satu ciri penelitian kualitatif adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.

Dimana kemudian penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi dan pandangan masyarakat desa terkait akan kebijakan yang telah sudah berlangsung selama wabah Covid-19 berlangsung.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat, manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang di peroleh di lapangan. Penentuan focus penelitian lebih diarahkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi perekonomian dan sosial ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih mana data yang relevan dan mana data yang tidak relevan. (Sugiyono 2017) pembatasan dalam penelitian kualitatif lebih didasarkan pada tingkat kepentingan, urgensi dan reabilitas masalah yang akan dipecahkan. Penelitian ini difokuskan meliputi:

1. Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB dalam penyaluran bantuan selama Covid-19
  - a. Jenis bantuan dan program
  - b. Program JPS Gemilang
  - c. Kelompok sasaran
  - d. Ketepatan sasaran program kebijakan
  - e. Evaluasi kebijakan
  - f. Hambatan dan solusi perbaikan program

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Penelitian tentunya akan diadakan di Provinsi NTB tepatnya di desa Sapugara-Bree meman menjadi salah satu sasaran dari program Jaring Pengaman Sosial (JPS) tersebut.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

1. Jenis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Data Primer**

Menurut Hasan (2002: 82) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Data primer ini antara lain : Catatan hasil wawancara, hasil observasi lapangan dan data-data mengenai informan.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada (Hasan, 2002: 58). Data ini digunakan untuk

mendukung informasi primer yang telah diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.

## 2. Sumber Data

### a. Narasumber atau *Informan*

*Informan* adalah orang dalam latar penelitian. menurut Arikunto (2002: 122) ialah orang yang memberikan informasi. Pemilihan informan dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan teori yang dikaji dalam penelitian ini, serta telah berinteraksi secara langsung dengan pustakawan yang bertugas pada bagian sirkulasi.

Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi penelitian ialah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang benar-benar terjangkau (Basrowi dan Suwandi, 2008: 86). Narasumber atau *Informan* ini antara lain :

### b. Dokumen

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Dokumen dalam penelitian ini bisa berupa catatan tertulis, rekaman, gambar atau benda yang berkaitan dengan segala hal yang berhubungan dengan fokus penelitian.

### c. Peristiwa

Peristiwa digunakan peneliti untuk mengetahui proses bagaimana sesuatu secara lebih pasti karena menyaksikan sendiri secara langsung.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Menurut (Riduwan, 2012:69) “metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data”. Menurut (Sugiyono, 2018:224) “Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, jika peneliti tidak mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapat data yang memenuhi standar”. Untuk memperoleh data yang diperhatikan maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### **1. Observasi**

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu teknik wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang maka observasi tidak terbatas pada orang tetapi juga obyek-obyek alam yang lain.

Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa observasi merupakan satu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan



observasi dilakukan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dibedakan menjadi *participant observation* (observasi berperan serta) dan *non participant observation*, selanjutnya dari segi instrumentasi yang digunakan, maka observasi dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan tidak terstruktur.

## 2. Wawancara

(Sugiyono, 2018:137-138) Wawancara adalah suatu percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang akan lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Dimana dalam hal ini wawancara akan dilakukan dengan staf kantor desa Sapugara-Bree serta masyarakat desa yang menjadi sasaran dari program pemprov tersebut.

## 3. Dokumentasi

(Sugiyono, 2018) Dokumentasi adalah untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data

yang relevan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini didapatkan dari laporan-laporan selama kegiatan penyaluran bantuan serta gambar yang diperoleh selama kegiatan tersebut berlangsung.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Pengolahan dan analisis data menggunakan analisis deskriptif dilakukan untuk mengidentifikasi Kebijakan Pemprov NTB dalam menangani mengalokasikan dana bantuan agar dapat disalurkan secara tepat dan untuk masyarakat sasaran yang tepat pula.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang didasarkan data deskriptif dari status, keadaan, sikap, hubungan, atau sistem pemikiran suatu masalah yang menjadi objek penelitian. Setelah mendapatkan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini maka hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah mengolah data yang terkumpul dengan menganalisis data, mendeskripsikan data, serta mengambil kesimpulan. Untuk menganalisis data ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh merupakan kumpulan keterangan-keterangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu, pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari informan. Teknik analisis data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah analisis data induktif. Analisis data induktif adalah penarikan kesimpulan yang berangkat dari fakta-fakta khusus, untuk kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Adapun langkah-langkah untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari, mencatat, dan mengumpulkan semua secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan yaitu pencatatan data dan berbagai bentuk data yang ada di lapangan.

#### 2. Reduksi Data

Menurut Sugiyono (2010: 338). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

#### 3. Penyajian Data (*Display Data*)

Menurut Amailes dan Huberman (Sugiyono, 2010) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks dan naratif. Pada tahap ini peneliti menyajikan data-data yang

telah direduksi ke dalam laporan secara sistematis. Data disajikan dalam bentuk narasi berupa Persepsi Masyarakat Desa Sapugara-Bree terhadap Kebijakan Penyaluran Bantuan oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam Bentuk Program JPS Gemilang.

#### 4. Pengambilan Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Sugiyono (2010) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.

Dalam penelitian ini data yang telah diproses dengan langkah-langkah seperti di atas, kemudian ditarik kesimpulan secara kritis dengan menggunakan metode induktif yang berangkat dari hal-hal yang bersifat khusus untuk memperoleh kesimpulan umum yang objektif. Kesimpulan tersebut kemudian diverifikasi dengan cara melihat kembali pada hasil reduksi dan *display data* sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang dari permasalahan penelitian.

#### **G. Keabsahan Data**

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability* (Sugiyono, 2007). Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan:

#### 1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

##### a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga

informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap. Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

- c. Triangulasi Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu.

Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007).

#### 1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data.

#### 2) Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

#### 3) Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.

d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

f. Mengadakan *Membercheck*



Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan (Sugiyono, 2007).

## 2. *Transferability*

*Transferability* merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil (Sugiyono, 2007). Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan.

## 3. *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula. Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses

penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

#### 4. *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji confirmability berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Barany J. Iestary. 2020. *Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi Covid-19: Sudahkah Tepat Sasara?* CSIS Commentaries.
- Durkheim, Emile. 1990. *Pendidikan Moral Suatu Teori dan Aplikasi Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga.
- HadiSutrisno. 1986. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Horton Paul B. dan Chester L. Hunt. 1993. *Sosiologi, Jilid 1 Edisi Keenam, (Alih Bahasa: Aminuddun Ram, Tita Sobari)*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Marx Karl. 2006. *Kapital Buku II Terjemahan Oey Hay Djouen*. Jakarta: Hasta Mitra.
- MiftaToha. 2003. *Prilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Moeloeng J. Lexy. 2000. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- P at al Bagus Arika. 2020. *Policy Analysis Melindungi Pekerja Rentan di Masa (dan Pasca) Pandemic Covid-19*. IGPA MAP FISIPOL UGM dan Forbil Institut.
- RakhmatJalaluddin. 2004. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Riduwan. 2012. *Metode & Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Robbins P. Septen. 2003. *Pelaku Organisasi*. Jakarta: PT. Indeks Kelompok.
- Slameto. 2010. *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemardjan Selo & Soelaeman. 1964. *Setangkai Bunga Sosiologi*. Jakarta: Lembaga FE-UI.
- Suwandi dan Basworo. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta
- Suryabrata, Sumadi. 1987. *Metode Penelitian*. Jakarta: Rajawali.
- Wailgito, Bimo. 1989. *Pengantar Psikologi Umum*. Surabaya: Bina Ilmu.

### Internet

- DISKOMINFOTIK. 2021. *COVID-19 NTB*. <https://corona.ntbprov.go.id/list-data>. Diakses pada tanggal 02 April 2021
- Edy. (2021). *Berdayakan UKM Daerah, JPS Gemilang Tahap II Semua Serba Lokal*. Diambil kembali dari <https://www.ntbprov.go.id/post/berdayakan-ukm-daerah-paket-jps-gemilang-tahap-ii-semua-serba-lokal>.
- Ewi. (2021). *Gubernur Zulkieflimansyah Kembali Kenalkan Konsep JPS Gemilang*. Diambil kembali dari <https://lombokpost.jawapos.com/ntb/22/01/2021/gubernur-zulkieflimansyah-kembali-kenalkan-konsep-jps-gemilang/>,.
- Gitiyarko, V. (2020). *Upaya dan Kebijakan Pemerintah Indonesia Menangani Pandemi Covid-19*. Diambil kembali dari <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/upaya-dan-kebijakan-pemerintah-indonesia-menangani-pandemi-covid-19>.
- Info Domp. (2020). *Hadapi COVID-19, Pemprov NTB Tak Terapkan PSBB Melainkan PSBL*. Diambil kembali dari <https://kumparan.com/infodomp/hadapi-covid-19-pemprov-ntb-tak-terapkan-psbb-melainkan-psbl-1tMTle9h0eT>.
- Liputan6. (2021). *Berita Vaksin Hari ini - Kabar Terbaru Terkini/Liputan6.com*. Diambil kembali dari <https://www.liputan6.com/tag/vaksin?type=profile>.
- Sari, Amalia, Purnama. 2021. *Vaksinasi Tembus 10 Juta, Indonesia Tempati Urutan Terbanyak Ke 4*. <https://health.kompas.com/read/2021/03/30/112245368/vaksinasi-tembus->

10-juta-indonesia-tempati-urutan-ke-4-terbanyak. Diakses pada tanggal 02 April 2021

Worldometers. (2021). *Corona Virus Update (LIVE)*. Diambil kembali dari [https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm\\_campaign=homeAdvegas1?](https://www.worldometers.info/coronavirus/?utm_campaign=homeAdvegas1?).

[https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk\\_hukum/Lampiran%20Pergub%20Nomor%2022%20Tahun%202020.pdf](https://jdih.ntbprov.go.id/sites/default/files/produk_hukum/Lampiran%20Pergub%20Nomor%2022%20Tahun%202020.pdf)

<https://www.ntbprov.go.id/post/jps-gemilang-tahap-ii-sasar-125000-kk-masalah-tidak-boleh-terulang>